

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NO 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA BOGOR)

Nancy Purnamasari Setiawan¹, Denny Hernawan², Euis Salbiah³

¹ Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

² Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

³ Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 01-02-2017)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 01-04-2017)

ABSTRACT

The objective of this research is to know the evaluation of Local Regulation of Bogor City Number 12 Year of 2009 about Non-Smoking Area (Case Study of the implementation of Non-Smoking Area in High School around Bogor City).

The theory used in this research is policy evaluation theory proposed by William Dunn. According to Dunn to evaluate a policy there are six dimensions that can be used namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.

Method used in this research is quantitative method. Data collecting method used in this research are literature study and field study. Meanwhile, population in this study are Headmaster, Head of Administration Office, and Head of OSIS (Student Organization of Intra-School) in High School. The number of sample choosed are 30 respondents based on purposive sampling method.

Based on evaluation reveals that the implementation of Local Regulation of Bogor City Number 12 Year of 2009 about Non-Smoking Area yield a score of 3,50, that means "good" in criteria. Referring to six dimensions of, effectiveness, responsiveness, and appropriateness are "good" in category. On the other hand, efficiency, adequacy, and equity are dimensions with "moderate" in category.

Key word : Leadership, Performance, employees

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Menurut William Dunn untuk mengevaluasi suatu kebijakan terdapat enam dimensi yang dapat digunakan, yaitu; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Ketua Osis Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan).

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor diperoleh skor 3,50. Skor tersebut menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hal ini berdasarkan rekapitulasi jawaban responden terhadap enam dimensi. Dimensi efektivitas berada pada kategori baik, efisiensi berada pada kategori sedang, kecukupan berada pada kategori sedang, pemerataan berada pada kategori sedang, responsivitas berada pada kategori baik dan ketepatan berada pada kategori baik.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah

Nancy Purnamasari Setiawan, 2017. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor). Jurnal Governansi

PENDAHULUAN

Merokok adalah suatu kegiatan yang sangat merugikan, tidak hanya bagi sang perokok atau yang sering disebut (perokok aktif) tapi juga bagi orang disekitarnya atau yang sering disebut (perokok pasif). Setiap asap rokok yang ditimbulkan dari rokok, terkandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Semakin banyak orang yang merokok, maka semakin banyak juga bahaya yang dapat ditimbulkan. Dalam bungkus rokok jelas disebutkan bahwa rokok dapat membunuhmu. Namun sepertinya peringatan itu tidak dianggap serius bagi para perokok aktif. Kerugian tidak hanya dirasakan bagi perokok aktif namun bagi perokok pasif, karena setiap asap yan terhisap juga berbahaya.

Di Kota Bogor pemerintah kota mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur para perokok aktif agar tidak merokok disembarang tempat. Sehingga tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok atau perokok pasif.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok disebutkan bahwa ada beberapa tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok diantaranya:

- a. Tempat umum;
- b. Tempat kerja;
- c. Tempat ibadah;
- d. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- e. Kendaraan umum;
- f. Lingkungan tempat proses belajar mengajar;
- g. Sarana kesehatan;
- h. Sarana olahraga.

Sekolah merupakan sarana belajar mengajar yang sudah seharusnya memiliki lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Keberadaan rokok atau asap rokok di sekolah akan sangat mengganggu kesehatan setiap siswa dan seluruh warga sekolah. Sekarang ini sering ditemukan banyak siswa atau pelajar yang merokok, terutama para pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas. Tidak hanya pelajar terkadang warga sekolah yang lain pun masih sering merokok di lingkungan sekolah.

Menurut data hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2014 terhadap 9.762 siswa Sekolah Menengah Atas ditemukan sebanyak 1.424 siswa yang merokok. Data tersebut memang bukan hasil survey keseluruhan pelajar SMA se-Kota Bogor. Namun secara garis besar, masih banyak pelajar yang merokok. Terdapat beberapa alasan yang mendasari perilaku pelajar untuk merokok, diantaranya; mendapat inspirasi, keren, bisa bergaul, dan pelampiasan. Dan tercatat masih ada 1,90% pelajar yang masih merokok di lingkungan sekolah.

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini telah ditetapkan dan diberlakukan sejak tahun 2009. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi. Masih banyak dan sering ditemukan orang yang merokok disembarang tempat, termasuk di Sekolah.

Hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pada tanggal 2 april 2015 ditemukan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri. Pada SMAN 4 Kota Bogor telah ditemukan beberapa bukti pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok diantaranya; ditemukan asbak ditempat kerja satpam, ditemukan puntung rokok di tempat kerja, dan ditemukan pemantik di ruang kelas. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut maka SMAN 4 Kota Bogor dikenakan sanksi berupa surat peringatan.

Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan warga sekolah masih belum maksimal. Tidak hanya pelajar yang harus mematuhi peraturan ini, namun seluruh warga sekolah yang berada di lingkungan sekolah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, pelanggaran Perda KTR mencapai 135 kasus pada 2014. Ratusan kasus itu ditindak melalui pidana ringan. Sedangkan pada 2015, jumlah kasusnya menurun menjadi 68. Tapi jika dilihat sejak 2010, jumlahnya naik turun.

Untuk memberikan efek jera bagi para pelanggarnya, dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok disebutkan bahwa bagi setiap pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif yang dijelaskan pada pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014: 8) Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif. Dalam hal ini peneliti mencoba mengemukakan maupun menjelaskan secara deskriptif yang ditemukan di lapangan.

Menurut Sukandarrumidi (2012: 104) penelitian deskriptif adalah: "Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif biasa harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal".

FOKUS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Teori yang dikemukakan oleh William Dunn menunjuk enam kriteria penting dalam pelaksanaan kebijakan. Enam kriteria yang dikemukakan oleh William Dunn dalam Herabudin (2016: 169) adalah :

1. Efektivitas

Menunjuk pada apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

2. Efisiensi

Seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3. Kecukupan

Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.

4. Pemerataan

Menunjuk pada biaya manfaat yang didistribusikan harus terbagi secara merata kepada seluruh kelompok sasaran.

5. Responsivitas

Menunjuk pada apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan atau nilai tertentu.

6. Ketepatan

Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau tercapai.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik penelitian pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah kepustakaan yang berkenaan dengan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah yang berasal dari buku pedoman

maupun yang berasal dari sumber lainnya yang berkaitan dengan judul Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor).

2. Studi Lapangan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik studi lapangan. Studi lapangan yaitu dengan meninjau secara langsung ketempat lokasi penelitian, peneliti melakukan ini untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal penelitian ini dengan cara :

- a. Observasi adalah teknik memperoleh data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung pada sumber data yang akan dianalisis mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor).
- b. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam hal ini kuisisioner akan diberikan kepada anggota badan hukum yang dijadikan sampel.
- c. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor).

Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 147)

Deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sesuai dengan faktanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Untuk mempermudah analisis data dan penarikan kesimpulan maka disamping menggunakan perhitungan persentase juga dilakukan dengan menggunakan statistik sederhana yaitu mentransformasikan data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Weight Mean Score (WMS) yaitu dilakukan pembobotan untuk setiap indikator. Dengan pemberian skor tersebut, maka akan diperoleh variasi jawaban 1-5, karena itu interval antara satu kriteria dengan kriteria lainnya yang diperoleh angka sebesar 0,8. Angka ini diperoleh setelah adanya pengurangan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi banyaknya alternatif jawaban. Untuk menentukan kriteria penilaian harus dihitung terlebih dahulu interval antara satu kriteria dengan kriteria yang lain dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

$$I = \frac{SKT - SKR}{V}$$

V

Keterangan :

- I = Interval
 SKT = skor tertinggi
 SKR = skor terendah
 V = Jumlah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.19
Rekapitulasi Jawaban Responden
Terhadap Variabel Analisa Evaluasi
Kebijakan

Dimensi	Indikator	Nilai
Efektivitas	Pemahaman tentang perda	4,10/ Baik
	Keberhasilan kebijakan	3,63/ Baik
Efisiensi	Proses sosialisasi	3,50/ Baik
	Konsistensi pengawasan dalam pelaksanaan	2,80/ Sedang
Responsivitas	Pengaruh setelah kebijakan dilaksanakan	3,66/ Baik
	Manfaat pelaksanaan kebijakan	3,90/ Baik
Ketepatan	Penurunan jumlah pelanggaran	4,43/ Sangat Baik
Total Jawaban Responden		21,02
Rata-rata		3,50 Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2017.

Dimensi Efektivitas

Efektivitas merupakan hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Apabila suatu kebijakan telah berjalan dengan efektif maka, kebijakan tersebut dapat dikatakan telah berhasil. Dimensi Efektivitas memiliki beberapa indikator diantaranya:

1. Pemahaman Tentang Peraturan Daerah
2. Keberhasilan Kebijakan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pemahaman tentang peraturan daerah diperoleh skor akhir 4,10 yang menurut penafsiran berada dalam kategori baik hal tersebut didukung dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menyatakan bahwa seluruh warga sekolah telah memiliki pemahaman tentang Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.

Indikator keberhasilan kebijakan diperoleh skor akhir 3,63 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menyatakan bahwa menurutnya kebijakan ini telah berhasil dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sudah berkurangnya tindak pelanggaran di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor.

Dimensi Efisiensi

Efisiensi memiliki beberapa indikator yang berpengaruh dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor). Dimensi ini meliputi indikator proses sosialisasi, konsistensi pengawasan dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi.

Proses sosialisasi diperoleh skor akhir 3,50 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hal ini didukung dengan sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menyatakan bahwa Sosialisasi yang dilakukan pertama kali untuk memperkenalkan dan menjelaskan tentang Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diarahkan pada Guru. Guru diberikan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan agar dapat menjadi contoh dan dapat menerapkan kebijakan ini di sekolahnya masing-masing. Selain sosialisasi kepada guru Dinas Kesehatan juga membentuk duta Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah. Tidak hanya guru, Dinas Kesehatan juga memberikan sosialisasi secara langsung pada murid Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor.

Konsistensi pengawasan dalam pelaksanaan diperoleh skor akhir 2,80 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan banyak responden yang beranggapan

bahwa pengawasan yang dilakukan masih kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menggunakan cara sidak (inspeksi mendadak) dan juga dengan melakukan tipiring (tindak pidana ringan). Sidak dilakukan rutin 3-4 kali dalam satu bulan di seluruh kawasan tanpa rokok. Untuk pengawasan lebih lanjut merupakan tanggungjawab sekolah.

Penerpaan sanksi diperoleh skor akhir 3,06 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan banyak responden yang beranggapan bahwa sanksi yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 kurang memberikan efek jera bagi pelanggar dan masih kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Namun seluruh sekolah memiliki aturan larangan murid merokok atau membawa rokok ke sekolah. Aturan terkait rokok ini menggunakan sistem point. Point pelanggaran terkait rokok merupakan point yang cukup besar berkisar dari 25-50 point.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menyatakan bahwa sanksi yang ada masih terlalu sedikit untuk nominal uang, namun norma sosial cukup tinggi karena ketika Dinas Kesehatan melakukan sidak (inspeksi mendadak) atau tipiring (tindak pidana ringan) selalu melibatkan media. Hal ini agar meningkatkan rasa malu dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Dimensi Kecukupan

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila segala kebutuhan mencukupi. Dalam dimensi ini terdapat beberapa indikator, yaitu:

1. Pemenuhan Biaya Pelaksanaan
2. Fasilitas Penunjang

Pemenuhan biaya pelaksana diperoleh skor akhir 3,23 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menyatakan bahwa Pelaksanaan peraturan ini mendapat anggaran yang cukup besar, yaitu kisaran 500.000.000,- per tahun. Anggaran ini dipergunakan untuk membuat stiker, billboard, menulis di meda cetak dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Anggaran yang ada dikelola sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan, dan fasilitas yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan akan didistribusikan pada seluruh kelompok sasaran.

Fasilitas penunjang diperoleh skor akhir 3,10 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menyatakan bahwa sekolah telah diberikan fasilitas berupa stiker atau billboard larangan merokok.

Dimensi Pemerataan

Pemerataan merupakan hal yang harus berjalan dengan baik, jika suatu kebijakan tidak merata pada seluruh kelompok sasaran maka setiap kelompok harus terbagi secara merata. Dalam dimensi ini terdapat beberapa indikator diantaranya; distribusi yang terbagi secara merata, fasilitas penunjang terbagi secara merata, dan kualitas sumber daya manusia terbagi secara merata.

Distribusi biaya terbagi secara merata diperoleh skor akhir 2,90 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian promosi kesehatan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Dinas Kesehatan mengelola anggaran yang ada dan tidak ada anggaran yang diberikan kepada sekolah.

Fasilitas penunjang terbagi secara merata diperoleh skor akhir 3,33 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Berdasarkan hasil wawancara

dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa seluruh kelompok sasaran mendapatkan fasilitas yang sama, namun ada perbedaan pada sekolah. Di sekolah tidak disediakan kawasan merokok karena memang pada lingkungan sekolah tidak boleh merokok.

Kualitas sumber daya manusia terbagi secara merata diperoleh skor akhir 2,96 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada masih kurang. Hal ini dikarenakan hanya ada dua orang yang terdapat pada unit kerja yang menjadi pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok ini.

Dimensi Responsivitas

Responsivitas adalah hal yang penting bagi suatu kebijakan. Jika kebijakan memiliki tingkat responsivitas yang tidak baik maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Indikator yang ada dalam dimensi ini adalah pengaruh setelah kebijakan dilaksanakan.

Pengaruh setelah kebijakan dilaksanakan diperoleh skor akhir 3,66 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hal ini dikarenakan banyak dirasakan perubahan setelah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa ada beberapa pengaruh yang timbul dari pelaksanaan kebijakan ini. Diantaranya angka kepatuhan meningkat dan mulai timbulnya perilaku sungkan atau malu untuk merokok di kawasan sekolah.

Dimensi Ketepatan

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Kebijakan yang tepat akan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Ada beberapa indikator yang terdapat dalam dimensi ini, diantaranya:

1. Manfaat Pelaksanaan Kebijakan
2. Penurunan Jumlah Pelanggaran Yang terjadi

Manfaat pelaksanaan kebijakan diperoleh skor akhir 3,90 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hal ini dikarenakan banyak manfaat yang dirasakan setelah kebijakan ini ada, diantaranya lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan bahwa peraturan kawasan tanpa rokok ini telah memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menjadi lebih sehat.

Penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi diperoleh skor akhir 4,43 yang menurut penafsiran berada pada kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan angka kepatuhan terhadap kebijakan ini terus menurun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian promosi kesehatan Dinas Kesehatan menyatakan data terakhir angka kepatuhan berada pada 67%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran terus berkurang.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa hambatan, diantaranya:

1. Tauladan dari Aparatur Sipil Negara Masih kurangnya disiplin dari Aparatur Sipil Negara atau (ASN) saat ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan kebijakan ini, karena sebagai ASN seharusnya dapat memberikan contoh bagi masyarakat terlebih bagi murid atau warga sekolah lainnya.
2. Iklan produsen rokok yang memasang langsung ke toko-toko Promosi yang dilakukan oleh produsen rokok merupakan hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan kebijakan ini, saat ini memang sudah jarang iklan rokok pada *billboard* besar namun sekarang produsen rokok lebih memilih untuk memasang langsung ke toko-toko dengan menempel stiker. Sehingga hal

ini sangat berpengaruh karena masih banyak warga sekolah yang dapat melihat iklan rokok

3. Kurangnya pemahaman tentang bahaya dari rokok Hal ini menjadi dasar dari tidak berjalannya peraturan kawasan tanpa rokok. Jika pemerintah sudah memberikan aturan untuk dipatuhi namun masyarakat atau warga sekolah belum menyadari bahaya yang ditimbulkan dari rokok, maka sulit sekali untuk tercapainya tujuan kebijakan ini secara maksimal.
4. Banyak toko-toko yang berjualan disekitar Sekolah. Hal ini juga menjadi hambatan sulitnya kebijakan ini berjalan dengan baik. Jika masih ada toko-toko yang berada disekitar sekolah memudahkan warga sekolah untuk membeli rokok atau merokok di lingkungan sekolah.

Dalam mengatasi masalah yang ada pelaksana kebijakan melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Sosialisasi
Sosialisasi terus dilakukan agar terus memberikan pemahaman tentang kebijakan Kawasan Tanpa rokok ini dan juga sanksi yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009.
2. Melakukan SIDAK (Inspeksi Mendadak)
Sidak dilakukan bertujuan agar pelanggaran yang ada dapat dikurangi dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Untuk tahun 2017 ditargetkan akan dilakukan 22 kali sidak diberbagai kawasan, termasuk Sekolah.
3. Upaya penegakan
Penegakan yang dilakukan adalah dengan melakukan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) untuk meningkatkan tingkat kepatuhan kebijakan kawasan tanpa rokok. Biasanya dalam 1 tahun tipiring dilakukan 4-5 kali pertahun, namun untuk tahun 2017 ditargetkan akan dilakukan sebanyak 10 kali TIPIRING.

4. Melibatkan media saat melakukan sidak atau saat tipiring.

Hal ini dimaksudkan agar memberikan hukuman secara moral, karena bagi pelanggar yang tertangkap akan diliput oleh media sehingga semua orang dapat mengetahuinya. Melibatkan media ini merupakan salah satu upaya agar tingkat kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok terus meningkat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentag Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentag Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) diperoleh skor sebesar 3,86 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang peraturan ini telah dipahami dengan baik dan kebijakan ini telah dianggap berhasil dilakukan.
2. Efisiensi dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentag Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) diperoleh skor 3,12 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hal ini didukung dengan proses sosialisasi yang baik. Namun konsistensi pengawasan masih dianggap sangat kurang dan penerapan sanksi yang sudah cukup baik dilakukan.
3. Pemerataan dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentag Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor)

diperoleh skor 3,06 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan pendistribusian biaya, fasilitas dan sumber daya manusia yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah.

4. Responsvitas dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) diperoleh skor 3,66 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah ini telah memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan sekolah.
5. Ketepatan dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) diperoleh skor 3,76 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hal ini dikarenakan kebijakan ini telah memberikan manfaat yang baik dan menurunkan jumlah pelanggaran yang terjadi di sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) diperoleh skor akhir 3,50 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hasil ini berdasarkan rekapitulasi seluruh dimensi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. (2012) *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herrabudin. (2016) *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009) *Kebijakan*

Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis; Edisi Revisi. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Riant. (2015) *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang; Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siregar, Bakri (1982) *Metode Riset Sosial: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2006) *Metode Penelitian Administrasi; Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. (2012) *Metodologi Penelitian; Cetakan Keempat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press.

Sumber Dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Profil Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun